

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA UNTUK UPAYA MENGURANGI PENGANGGURAN DI KELURAHAN DUPAK KECAMATAN KREMBANGAN KOTA SURABAYA

Camelle Aqila^{1*}, Anggraeny Puspaningtyas², dan M. Kendry Widiyanto³

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli 2024

Revised Juli 2024

Accepted Juli 2024

Available online Juli 2024

aqilaelle@gmail.com,
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id,
kenronggo@untag-sby.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstrak

Pengangguran merupakan salah satu persoalan permasalahan ekonomi yang pasti terjadi di setiap negara khususnya juga yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana pengangguran masih belum bisa sepenuhnya teratasi dengan baik. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia berbanding terbalik dengan adanya peningkatan pertumbuhan angkatan kerja yang semakin hari semakin melonjak. Pada negara berkembang seperti Indonesia sangat benar-benar membutuhkan terbukanya lapangan pekerjaan sebesar-besarnya yang harus menjadi konsekuensi utama pemerintah kita. Terlebih lagi pada saat ini bisa dikatakan merupakan masih dalam masa transisi perubahan yang sangat besar dari masa sulit pandemi Covid-19 yang mana membuat banyak dari masyarakat kita memerlukan pemulihan kondisi khususnya dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada masa setelah terjadinya fenomena pandemi Covid-19 membuat beberapa negara mengalami penurunan

pendapatan. Hal ini juga terjadi di Indonesia, banyak para pekerja di setiap instansi khususnya dalam dunia kerja baik itu buruh pabrik maupun buruh swasta banyak yang dipecat dan menjadi pengangguran. Melihat kondisi ini pemerintah melakukan upaya perluasan pelaksanaan penunjang untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dimasyarakat yang disebut dengan Program Padat Karya (PPK). Surabaya mendapati bahwa wilayah Surabaya yang ditunjuk sebagai pemerintahan pusat dari beberapa wilayah yang ada disekitarnya dan sebagai contoh reformasi birokrasi (RB) tematik guna mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat ini perlu banyak mengembangkan berbagai programnya terkait dalam menanggulangi masalah pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dalam naungan wilayahnya. Salah satu dari program yang dicanangkan oleh pemerintah Surabaya adalah termasuk Program Padat Karya Perkotaan (PKP) yang telah diatur di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023.

Kata kunci: Program Padat Karya, Pengangguran, Kemiskinan

1. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini permasalahan terkait perekonomian merupakan sebuah permasalahan yang sangat konsekuensi bagi pemerintah dunia dan menjadi perbincangan baik dari masyarakat tingkat rendah, menengah, sampai pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang sangat mumpuni atau lebih dari cukup. Perkembangan dunia ekonomi membuat sering terjadinya gejolak dalam kehidupan masyarakat secara luas begitu juga pada masyarakat Indonesia secara khusus. Karena, adanya permasalahan perekonomian disebuah negara menjadikan sebuah negara tersebut mengalami kesulitan dalam mengembangkan kompetensi sumber daya yang ada dinegara tersebut.

Khususnya di Indonesia permasalahan ekonomi membuat negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi disegala faktor menjadi kurang pesat atau bisa dikatakan sangat lambat. Permasalahan ini sangat rumit terjadinya mulai dari daerah dipenjuru yang terpencil sampai pada daerah kota-kota besar yang menjadi penopang ekonomi negara (Maulina, 2023). Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penduduk di negara kita ini yang tergolong dalam masyarakat miskin, pendidikan kita yang masih dirasa rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan masih banyaknya pengangguran yang sampai dengan saat ini pengangguran di Indonesia ini dapat dikatakan terus meningkat. Lebih dari pada itu permasalahan terkait pengangguran ini sekarang sudah menjadi permasalahan sosial yang dianggap paling rendah dari segi penanganannya.

Suatu penduduk dikatakan pengangguran jika penduduk yang ada disuatu daerah masih dalam usia produktif untuk bekerja namun tidak memiliki pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, pengangguran juga bisa dikatakan sebagai sebuah kondisi seorang individu dalam golongan angkatan kerja namun dalam kenyataannya kondisinya sekarang belum memperoleh pekerjaan (Wandan Sari & Merinawati, 2024). Dari dua pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, pengangguran merupakan suatu kondisi atau keadaan seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dimasa usia produktifnya dalam bekerja yang disebabkan karena tidak mampunya masyarakat dalam menyerap atau mengikuti kemajuan teknologi yang sedang terjadi, tidak seimbangnya antara kebutuhan tenaga kerja yang ada di kota dan di desa atau daerah-daerah terpencil, kurangnya kompetensi atau ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan juga besarnya angkatan kebutuhan kerja yang tidak berimbang dengan lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia.

Pengangguran merupakan salah satu persoalan permasalahan ekonomi yang pasti terjadi di setiap negara khususnya juga yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana pengangguran masih belum bisa sepenuhnya teratasi dengan baik. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia berbanding terbalik dengan adanya peningkatan pertumbuhan angkatan kerja yang semakin hari semakin melonjak. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Alwi, 2022) yang menyatakan bahwa, "tantangan besar dalam bidang ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini adalah tingkat pengangguran yang masih besar jumlahnya, lapangan pekerjaan belum mencukupi, dan peningkatan pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan". Dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa, pada negara berkembang seperti Indonesia sangat benar-benar membutuhkan terbukanya lapangan pekerjaan sebesar-besarnya yang harus menjadi konsern utama pemerintah kita. Terlebih lagi pada saat ini bisa dikatakan merupakan masih dalam masa transisi perubahan yang sangat besar dari masa sulit pandemi Covid-19 yang mana membuat banyak dari masyarakat kita memerlukan pemulihan kondisi khususnya dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada masa setelah terjadinya fenomena pandemi Covid-19 membuat beberapa negara mengalami penurunan pendapatan. Hal ini berdampak pada banyaknya para pekerja disetiap instansi khususnya dalam dunia kerja baik itu buruh pabrik maupun buruh swasta banyak yang dipecat dan menjadi pengangguran. Secara tidak langsung, dengan kata lain pada masa fenomena pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap dunia perekonomian Indonesia yang mana membuat angka pengangguran dan angka kemiskinan mengalami peningkatan secara signifikan (Naufal, 2021). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam beberapa tahun terakhir sebelumnya kasus pengangguran dan pendapatan yang dirasa rendah oleh para pekerja di Indonesia masih belum sepenuhnya dapat teratasi apalagi ditambah dengan adanya masa fenomena pandemi Covid-19 tersebut makin membuat sejumlah warga kebingungan. Kebingungan

ini terjadi disebabkan karena yang sudah mempunyai pekerjaan pun harus terpaksa dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaannya dengan adanya krisis pada masa fenomena pandemi Covid-19 tersebut. Dari keterkaitan dua permasalahan tersebutlah kondisi banyaknya pengangguran dan kemiskinan diberbagai daerah Indonesia masih dirasa perlu untuk menjadi konsern utama dan perlu untuk segera diberikan suatu langkah pasti dari pemerintah mulai dari tingkat daerah sampai pusat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Indonesia per-Juni tahun 2023 mencapai 278.696,2 jiwa, sedangkan jumlah tingkat kemiskinan bulan September 2012 sampai dengan bulan Maret 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sebelum pandemi hingga pasca pandemi Covid-19. Adapun profil jumlah dan tingkat kemiskinan pada tahun 2012 sampai dengan 2023 yang sedang telah terjadi di Indonesia dapat dilihat pada grafik dari berita resmi statistik No.47/07/Th.XXVI, 17 Juli 2023 di bawah ini:



Gambar 1.1 Profil Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia
Bulan September 2012 sampai dengan Bulan Maret 2023
Sumber: (Midayanti, 2023)

Dari gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa, pada periode bulan Maret 2019 sampai dengan bulan September 2019 tingkat kemiskinan di Indonesia turun 0,36% atau sebanyak 24,78 juta jiwa. Pada periode bulan Maret 2020 sampai dengan bulan September 2020 tingkat kemiskinan di Indonesia terjadi kenaikan hingga 1,13% atau sebesar 27,55 juta jiwa yang mana pada saat itu merupakan akibat dari dampak masuknya fenomena pandemi Covid-19 ke Indonesia. Akan tetapi, seiringnya berjalannya waktu kebijakan pemulihan yang dicanangkan oleh pemerintah terus berubah dan bahkan dapat dikatakan membaik. Hal ini dapat dilihat dari kondisi perekonomian Indonesia yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 25,90 juta orang setelah kontraksi fenomena pandemi Covid-19.

Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 yang tertuang pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa, sebagai sebuah kepala pemerintahan yang ingin mengayomi dan mengelola masyarakatnya dengan baik pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan berbagai upaya untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan yang sedang marak dan meningkat pesat pada belakangan ini yaitu antara lain dengan mengeluarkan peraturan

terkait perluasan kesempatan kerja yang harus diterapkan diberbagai daerah. Selain itu pemerintah juga memiliki upaya dengan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat dikalangan menengah ke bawah berupa pemberian bahan-bahan pokok gratis, program kartu prakerja, dan lain sebagainya yang sejenis. Disisi lain beberapa masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, pemerintah tidak tinggal diam dengan memberikan arahan kepada masyarakat umum untuk mau memulai berinovasi seperti berjualan melalui online. Dimana kondisi ini tentu saja dapat menguntungkan kedua belah pihak antara pembeli maupun penjual. Dari kegiatan tersebut para masyarakat dapat berbelanja atau berjualan tanpa mengkhawatirkan kondisi yang terbatas seperti pada saat terjadi fenomena pandemi Covid-19 atau keterbatasan waktu yang disebabkan karena kondisi sibuk.

Lebih dari pada itu dalam menjalankan dan meningkatkan program terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya, pemerintah melakukan upaya perluasan pelaksanaan penunjang untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan dimasyarakat yang disebut dengan Program Padat Karya (PPK). Program Padat Karya ini merupakan sebuah program kegiatan pembangunan dimana sumber daya utamanya adalah manusia daripada mesin atau dengan kata lain tenaga sumber daya manusia lebih banyak digunakan daripada menggunakan kekuatan mesin sebagai penunjang pekerjaan dengan tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya bagi masyarakat secara umum yang telah mengalami kehilangan penghasilan agar mendapatkan pekerjaan yang tetap (Lafina et al., 2023). Secara langsung Program Padat Karya yang dicanangkan pertama kali oleh masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini bertujuan untuk memberikan penawaran kesempatan kerja kepada para pekerja yang masih dalam kondisi menganggur atau setelah menganggur karena dipecat oleh pekerjaan sebelumnya, dapat memanfaatkan sumber daya tenaga kerja masyarakat dengan meningkatkan kapasitas atau kuantitas dalam bekerja, dan dapat memberikan penghasilan atau pendapatan tambahan bagi masyarakat yang mau bekerja dengan upah yang lebih layak dari sebelumnya (Aqila et al., 2022). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, Program Padat Karya merupakan sebuah program yang diperuntuk untuk semua kalangan masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk ikut berkompetisi dalam mendapatkan pekerjaan agar para masyarakat ini tidak menjadi pengangguran dan jatuh pada kemiskinan, sehingga program pemberdayaan kesejahteraan masyarakat diseluruh daerah di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan membuat angka pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang. Salah satu bentuk Program Padat Karya ini berupa pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi seperti pekerjaan perbaikan jalan, perbaikan saluran air, dan sebagainya. Tentunya semua pekerjaan yang terkait dengan Program Padat Karya ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan daerah, dan karakteristik masyarakat yang ada di sekitar daerah yang menjalankan program tersebut.

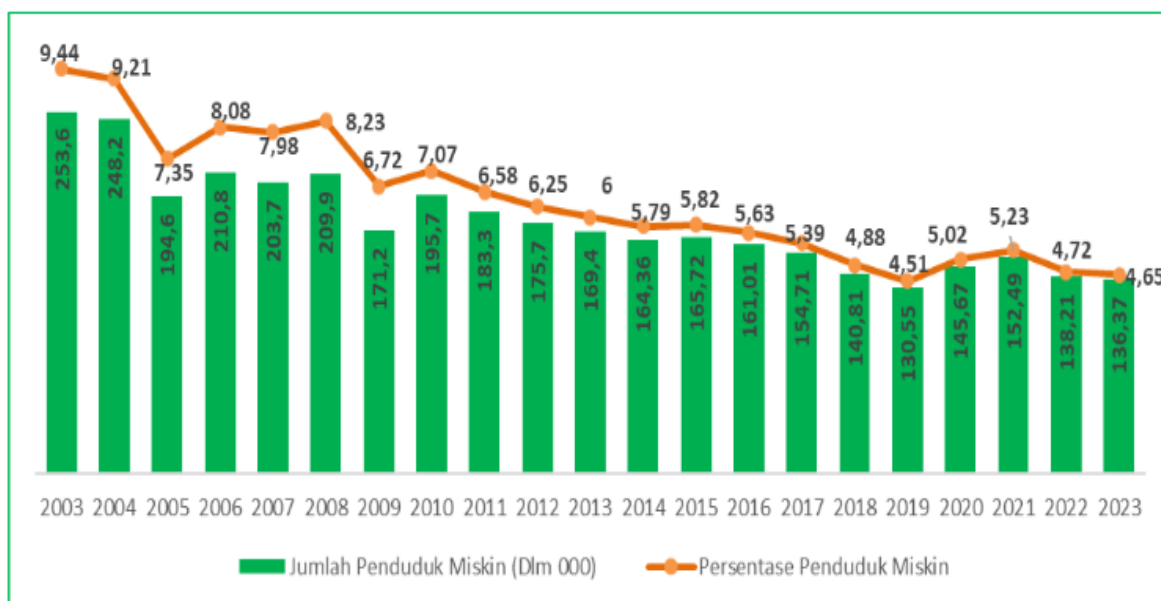
Karakteristik masyarakat disetiap daerah ini sangatlah penting, karena disetiap daerah karakteristik masyarakat sangatlah berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ketersediaannya dalam mengikuti setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah (Aqila et al., 2022). Hal ini dikarenakan bagaimanapun program pemerintah tetap membutuhkan partisipasi dari masyarakat secara langsung agar dapat diketahui sejauh mana keberhasilan atau tidaknya sebuah inovasi yang telah dibuat, dicanangkan, dan dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, karakteristik masyarakat ini juga dapat dijadikan sebuah acuan dalam meningkatkan kemampuan dan kemauan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan taraf hidup mereka dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi, pada kenyataannya yang terjadi dimasyarakat secara umum bahwa, sebagian besar masyarakat khususnya didaerah-daerah yang seperti pedesaan atau terpencil cenderung mempunyai sifat malas untuk mengikuti sejumlah

kegiatan ataupun program yang diadakan dan dicanangkan oleh pemerintah. Sebagian masyarakat lebih banyak menggantungkan hidup mereka hanya dengan mengharapkan bantuan langsung dari pemerintah baik berupa bantuan bahan-bahan pokok maupun bantuan yang berupa bantuan langsung tunai atau uang. Dari hal tersebut inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat untuk membuat dan menciptakan suatu program yang dapat dikemas semenarik mungkin agar masyarakat tertarik, sehingga masyarakat tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah tapi juga mau mengaplikasikan program dari pemerintah dengan sikap.

Sejalan dengan beberapa paparan yang telah penulis paparkan di atas, penulis yang pernah mengikuti program kampus merdeka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Surabaya mendapati bahwa wilayah Surabaya yang ditunjuk sebagai pemerintahan pusat dari beberapa wilayah yang ada disekitarnya dan sebagai contoh reformasi birokrasi (RB) tematik guna mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat ini perlu banyak mengembangkan berbagai programnya terkait dalam menanggulangi masalah pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dalam naungan wilayahnya. Pemerintah Surabaya yang mengatur intervensi dalam pemerintahan kota harus bisa menjalankan seluruh kegiatan programnya dengan tidak hanya berpedoman pada masyarakat miskin saja. Akan tetapi pelaksanaannya juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang rentan maupun masyarakat pra-miskin. Klasifikasi tersebut dapat diperoleh dari intervensi yang mirip seperti beberapa kemudahan bebas biaya sekolah, kesehatan sampai pada pekerjaan yang sesuai dengan tingkat kompetensi. Bagi keluarga miskin senantiasa disediakan tambahan bantuan dari pemerintah contohnya berupa Program Keluarga Harapan (PKH) maupun sejenisnya.

Walikota Surabaya Bapak Eri Cahyadi dengan anggotanya dalam menjalankan pemerintahan wilayah Surabaya senantiasa berusaha meminimalisir pengangguran serta menambah kesejahteraan warga Surabaya. Walikota menjelaskan beberapa kebaruan pemerintah kota Surabaya untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Salah satu dari program yang dicanangkan oleh pemerintah Surabaya adalah termasuk Program Padat Karya Perkotaan (PKP) yang telah diatur di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa, "pemulihan perekonomian daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan Program Padat Karya yang melibatkan keluarga miskin dalam pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya".

Berdasarkan data dari Pusat Statistik Kota Surabaya mencatat bahwa, angka kemiskinan per-Maret tahun 2023 mencapai 136,37 ribu jiwa. Disisi lain, angka kemiskinan di Kota Surabaya cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun presentase penduduk miskin. Adapun jumlah dan tingkat kemiskinan di Kota Surabaya mulai dari tahun 2003 sampai dengan bulan Maret 2023 dapat dilihat pada grafik dari berita resmi statistik dengan No.11/10/3578/Th.VI, 25 Oktober 2023 di bawah ini:



Gambar 1.2 Profil Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kota Surabaya Tahun 2003 sampai dengan Bulan Maret 2023

Sumber: (Setiawan, 2023)

Dari gambar 1.2 di atas dapat diketahui bahwa, angka kemiskinan di Kota Surabaya selama periode Maret 2023 mengalami penurunan karena terjadinya inflasi dimana Kota Surabaya menduduki urutan ketiga teratas di Provinsi Jawa Timur setelah Jember dan Sumenep dalam tingkat pengentasan kemiskinan terbesar yaitu sekitar 4,65% atau sebanyak 136,37 jiwa. Adanya inflasi yang cukup tinggi ini dalam kenyataannya mampu mendorong penduduk Kota Surabaya untuk terus berusaha keluar dari status masyarakat yang miskin. Selain itu, penurunan tingkat kemiskinan tersebut disebabkan dari adanya berbagai program bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah Kota Surabaya yang diterapkan dan dilaksanakan secara baik dan berkelanjutan diberbagai daerah naungan Kota Surabaya. Hal ini mendorong masyarakat Kota Surabaya berusaha secara maksimal menyambut program-program pemerintah.

Berkaitan dengan Program Padat Karya (PPK), pemerintah Kota Surabaya telah memulai program tersebut sejak dari bulan Maret 2022 sebagai suatu langkah pemerintah untuk menggerakkan kembali roda perekonomian Kota Surabaya yang terdampak selama fenomena pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelusuran mengenai penelitian yang membahas implementasi Program Padat Karya (PPK) yang ada di Kota Surabaya dengan urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh implementasi dari program Padat Karya tersebut dapat mengatasi pengangguran di Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan. Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya ini penulis pilih sebagai lokasi penelitian, karena populasinya yang cukup besar dan termasuk dalam suatu daerah di Kota Surabaya yang memiliki kategori kurang mampu atau tidak mampu. Banyak masyarakat yang ada daerah tersebut yang menganggur akibat faktor usia dan kesehatan, selain itu masyarakat disana kebanyakan bekerja sebagai buruh harian lepas. Lebih dari pada itu, penulis mengumpulkan data dari Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan dan menemukan bahwa jumlah keluarga miskin di daerah tersebut mencapai 779 jiwa/warga. Terkait dengan jumlah yang menerima Program Padat Karya (PPK) pada daerah tersebut sebenarnya ada 18 jiwa/warga, tetapi ada 3 warga yang mengundurkan diri sehingga jumlah yang menerima Program Padat Karya (PPK) hingga saat ini hanya ada 15 jiwa/warga. Adapun program yang berjalan di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya ini baru mulai berjalan pada bulan Januari 2024, akan tetapi

target dari Program Padat Karya (PPK) ini diharapkan dapat berlangsung selamanya untuk kelangsungan hidup keluarga miskin dan tidak hanya program yang hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan saja tapi juga masyarakat pra-kerja.

2. Tinjauan Pustaka

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut (Alwi, 2022) menyatakan bahwa, “kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat”. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat dan disusun oleh pemerintah sebagai sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu yang terkait dengan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat secara umum.

Pada suatu negara hukum tentunya masyarakatnya dalam kehidupan sering terjadi berbagai permasalahan, dan negara dan/atau pemerintah sebagai pemegang kepemimpinan harus mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut sebagai wujud tanggung jawab penuh. Untuk itu perlu adanya kebijakan publik yang harus dibuat dan dikeluarkan oleh negara dan/atau pemerintah sebagai sebuah harapan terciptanya solusi akan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah suatu tahapan penting dari seluruh struktur kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di suatu negara untuk mengatasi berbagai permasalahan masyarakatnya dan/atau sebagai wadah pengaturan kehidupan masyarakatnya. Sehingga tahapan ini menjadi sebuah penentu apakah langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk masyarakatnya benar-benar dapat diaplikasikan dengan baik dan dapat menghasilkan *output* maupun *outcomes* yang sesuai dengan harapan kesinambungan antara keinginan masyarakat dengan tujuan pemerintahan suatu negara. Untuk itu perlu adanya implementasi dari suatu kebijakan yang dikeluarkan dan dicanangkan oleh pemerintah agar *output* dan *outcomes* dapat benar-benar terwujud dan tidak hanya menjadi sebuah catatan-catatan elit para petinggi negara.

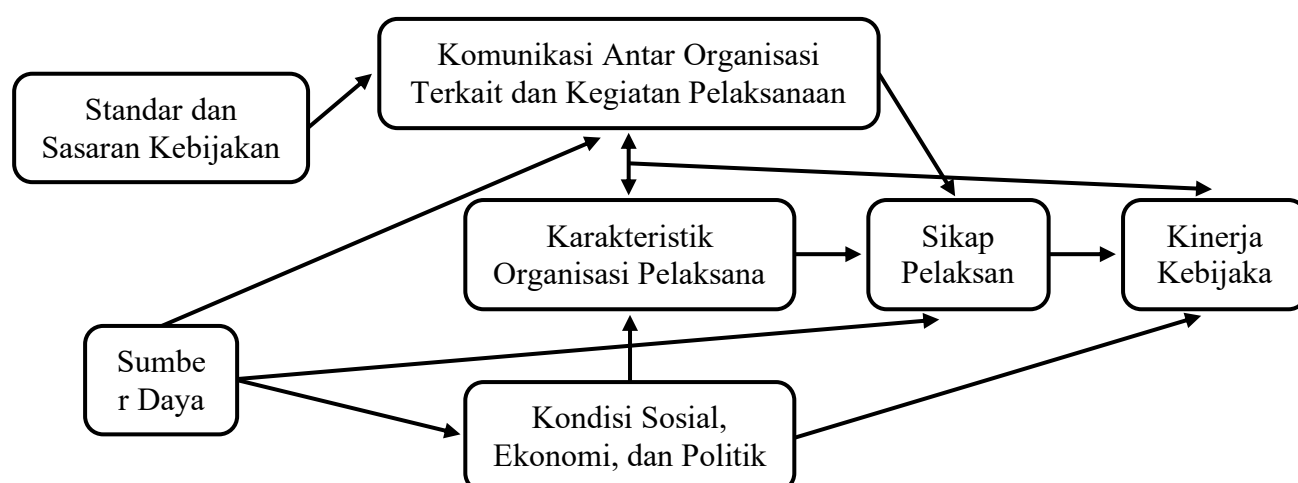
Secara konsep, implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan di sebuah negara sebagai sebuah langkah untuk mencapai tujuan berdirinya dan perkembangan negara yang telah dirumuskan dalam bentuk kebijakan untuk masyarakat yang menjadi naungannya. Sedangkan secara umum, implementasi kebijakan publik diartikan sebagai suatu turunan dari tataran penjabaran rumusan kebijakan dan tindakan suatu pemerintahan untuk masyarakat yang menjadi naungannya yang bersifat konkrit atau mikro. Secara langsung, implementasi kebijakan publik merupakan suatu pelaksanaan dari sebuah keputusan rumusan kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis, dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berbagai program yang sudah dirumuskan, dan adanya sejumlah dana yang telah disiapkan untuk mencapai berbagai sasaran yang juga telah ditetapkan dalam proses penyusunannya (Maulina, 2023).

Dari pengertian yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bukan hanya menjadi sekedar aktifitas maupun tindakan dari pelaksanaan suatu program, namun suatu langkah yang terencana dan dipalikasi secara sungguh-sungguh yang didasarkan dengan acuan dan pedoman norma tertentu dalam mencapai tujuan dari sebuah program untuk kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan bertatanegara.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Suatu implementasi kebijakan publik akan lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat umum apabila dalam proses pengaplikasiannya dilakukan dengan menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model yang diterapkan secara tidak langsung akan dapat memberikan sebuah gambaran kepada masyarakat umum secara bulat dan lengkap terkait dengan objek, situasi dan/atau proses yang sedang dijalankan atau diterapkan.

Adapun model dari implementasi kebijakan publik yang digunakan pada penelitian ini adalah model Van Meter dan Van Horn (1975) atau biasa disebut dengan *a model of the policy implementation process* merupakan suatu model implementasi yang menjelaskan tentang beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Kasmad, 2018). Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn ini dapat digambarkan pada gambar 2.3 yang disajikan di bawah ini:



Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Horn
Sumber: (Tachjan, 2006).

Program Padat Karya

Program padat karya merupakan suatu kegiatan yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja yang awalnya pengangguran dan/atau setengah pengangguran dari suatu daerah yang dianggap relatif banyak dari total prosentase suatu penduduk disuatu daerah (Permani, 2019).

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa, program padat karya adalah suatu kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai alat pemberdayaan masyarakat baik untuk pengangguran, setengah pengangguran, maupun masyarakat miskin melalui kegiatan pembuatan atau rehabilitasi infrastruktur yang sederhana maupun kegiatan lainnya yang dirasa produktif dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia lokal yang tersedia agar dapat lebih produktif, memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang sesuai dengan yang

terjadi di lapangan. Sehingga penelitian ini yang berjudul Implementasi Pelaksanaan Program Padat Karya untuk Upaya Mengurangi Pengangguran di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya menggunakan sebuah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian digunakan untuk membantu jalannya penelitian, menentukan aspek apa yang akan diselidiki dari objek penelitian, serta membantu peneliti dalam menetapkan arah penelitian yang diinginkan. Menurut (Sugiyono, 2010) menyatakan bahwa, “dalam penelitian kualitatif batasan masalah disebut fokus yang berisi inti dari masalah yang bersifat umum”. Sejalan dengan pendapat tersebut, pada penelitian kualitatif penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi lapangan. Fokus penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang digunakan, karena rumusan masalah penelitian menjadi pedoman dalam menentukan fokus penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi program padat karya di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dapat menjadi sebuah upaya untuk mengurangi pengangguran.

Adapun fokus penelitian ini berdasar kepada penjelasan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dengan beberapa komponen yang tercakup di dalamnya yaitu antara lain:

- 3.1.1 Standard dan sasaran kebijakan yang merupakan hal yang *crucial* yang mana pelaksana implementasi kegiatan mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakannya, karena mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan;
- 3.1.2 Sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik;
- 3.1.3 Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana;
- 3.1.4 Karakteristik organisasi pelaksana yang termasuk prosedur-prosedur kerja standar (*Standard Operating Procedures* = SOP) dan fragmentasi;
- 3.1.5 Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif, karena apabila tidak kondusif akan mengakibatkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan; dan
- 3.1.6 Sikap para pelaksana yang dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya (Kasmad, 2018).

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah di wilayah Kantor Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya yang beralamatkan lengkap di jalan Dupak Bandarejo I/11 dengan luas wilayah $\pm$ 48 hektar yang berbatasan sebelah utara dengan Kelurahan Morokembangan, timur Kelurahan Jepara, selatan Kelurahan Tembok Dukuh, dan sebelah barat Kelurahan Genting Kalianak.

Sumber Data

Sumber data merupakan tempat di mana penelitian memperoleh berbagai jenis data dan dokumen yang mendukung penelitian. Menurut (Sugiyono, 2010) terdapat dua jenis data dalam penelitian ini:

3.1.7 Data Primer

Data primer merupakan data dan informasi diperoleh secara langsung dari informan atau aktor selama pelaksanaan penelitian (Sugiyono, 2010). Pada implementasi pelaksanaan Program Padat Karya untuk upaya mengurangi pengangguran di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya yang

penulis teliti ini data primernya diperoleh dari lokasi penelitian melalui teknik observasi dan wawancara langsung dengan orang-orang atau instansi yang dianggap sebagai informan dengan tujuan mendapatkan informasi yang mendalam. Lebih dari pada itu, penulis juga menggunakan photo atau dokumentasi pada penelitian ini untuk menghasilkan data deskriptif yang bernilai dan dianalisis secara induktif. Photo atau dokumentasi dapat dihasilkan oleh orang lain atau oleh peneliti sendiri.

3.1.8 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber lain yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2010). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber utama tertulis yang meliputi dokumen penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada tabel 2.1, dokumen berita resmi statistik No.35/05/Th.XXVI tanggal 5 Mei 2023, dokumen berita resmi statistik No.47/07/Th.XXVI tanggal 17 Juli 2023, dokumen berita resmi statistik No.11/10/3578/Th.VI tanggal 25 Oktober 2023, dokumen rencana strategis tahun 2021-2026 Kota Surabaya dari Dinas Sosial Kota Surabaya, dan dokumen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif deskriptif atau suatu perumusan pernyataan secara aktual yang diperoleh dan diterjemahkan melalui kegiatan penelitian. Analisis data kualitatif menurut (Sugiyono, 2010) menjelaskan bahwa, "usaha yang dilakukan dengan cara bekerja melalui data, mengorganisasikannya, memilah masalah menjadi suatu yang bisa dijadikan penelitian, menemukan pola, dan menemukan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan dalam penelitian". Menurut (Sugiyono, 2010) juga menambahkan bahwa, "analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapat melalui hasil wawancara, catatan, dokumentasi serta bahan-bahan lainnya". Sehingga dengan teknik analisis, data yang didapatkan bisa mudah difahami, dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data tersebut, menjabarkan data yang ada kedalam hasil penelitian, dan mampu menyimpulkan hasil penelitian.

Adapun model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan dalam analisis yang dijelaskan sebagai berikut:

3.1.9 Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris. Kesimpulannya bahwa, proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis yang ada di lapangan, yang nantinya transkrip wawancara tersebut dipilah-pilah untuk mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

3.1.10 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan, dan informasi yang disimpulkan. Penyajian data disini juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3.1.11 Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Penarikan kesimpulan disini dilakukan peneliti dari awal peneliti mengumpulkan data seperti mencari pemahaman yang tidak memiliki pola, mencatat keteraturan penjelasan, dan alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data

yang diperoleh peneliti. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru, dalam pengertian lain lain temuan tersebut masih bersifat samar-samar atau kurang jelas (Saleh, 2017).

Pada penelitian ini penulis berusaha memperjelas dengan menggunakan teori yang sudah teruji keberhasilannya, kemudian peneliti menganalisis temuan baru tersebut sehingga menjadi jelas dengan menggunakan komponen dari analisis data yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

4. Hasil dan Pembahasan

Terdapat 6 faktor menurut Van Metter dan Van Horn (1975) yang dapat mempengaruhi kinerja kebijakan publik. Komponen tersebut antara lain adalah yang pertama standar dan sasaran kebijakan yang merupakan hal yang krusial yang mana pelaksana implementasi kegiatan mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakannya, karena mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Komponen yang kedua adalah sumber daya, dimana sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Komponen yang ketiga adalah komunikasi antar badan pelaksana. Komponen yang keempat adalah karakteristik badan pelaksana yang termasuk prosedur-prosedur kerja standar (*Standar Operating Procedures* = SOP) dan fragmentasi. Komponen kelima adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif, karena apabila tidak kondusif akan mengakibatkan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan. Komponen yang terakhir atau yang keenam adalah sikap pelaksana yang dipengaruhi oleh pandangan itu terhadap kepentingan pribadinya.

Adapun pembahasan terkait 6 komponen tersebut di atas terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

4.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan adalah adanya standar dan tujuan-tujuan dari penerapan suatu kebijakan. Oleh karena itu, indikator-indikator keberhasilan dan tujuan-tujuan kebijakan perlu jelas sehingga pihak pelaksana kebijakan tidak menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Karena, terjadinya berbagai interpretasi nantinya akan dapat menimbulkan kegagalan dari pelaksanaan kebijakan yang diterapkan.

Standar dan sasaran kebijakan dalam Program Padat Karya yang terkait dengan penelitian penulis ini sudah disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa, "pemulihan perekonomian daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan Program Padat Karya yang melibatkan keluarga miskin dalam pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya".

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Pusat tersebut maka, standar dan sasaran kebijakan ini harus benar-benar dapat tersalurkan dengan tepat agar nantinya pengimplementasian program Padat Karya ini dapat dikatakan berhasil. Pihak Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan sendiri sebagai pelaksana awal dari program Padat Karya ini harus benar-benar teliti dalam memilih warga yang menjadi sasaran dan termasuk ke dalam kategori pra-miskin dan miskin. Karena, kunci awal dari keterlibatan warga dalam mengikuti program Padat Karya ini adalah data dari Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan yang mereka masukkan dalam dua kategori tersebut.

Standar kebijakan terkait dengan program Padat Karya ini merupakan warga yang termasuk dalam usia 18 tahun sampai pada kurang dari 50 tahun dan

termasuk dalam kategori pra-miskin dan miskin. Kondisi kesehatan dengan tidak mengkhawatirkan kesehatan mereka setelah bekerja, dan bersedia untuk menempuh jarak jauh juga merupakan faktor pemilihan. Karena, keterlaksanaan program ini nantinya mereka dipekerjakan diseluruh wilayah Kota Surabaya dan tidak tahu akan ditempatkan dimana sesuai dengan dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan. Lebih dari pada itu, program Padat Karya ini mempunyai kontrak kerja selama belum berumur 58 tahun dengan kata lain sama dengan mereka diangkat menjadi pegawai tetap. Akan tetapi, apabila mereka termasuk ke dalam warga gamis dan miskin ekstrim dan bapaknya sudah memasuki usia lebih dari 50 tahun nantinya dapat dilanjutkan atau dialihkan kepada anak mereka jika mempunyai keturunan.

Pada penelitian ini survei dilakukan langsung ke masyarakat oleh pihak Kelurahan Dupak dengan dibantu dengan petugas dari Dinas Pendidikan. Pelaksanaan survei ini sekaligus juga melakukan sosialisasi kepada warga terkait dengan adanya program baru yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fitter Kusumaatmaja selaku staff Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Perekonomian dapat disimpulkan bahwa, warga cukup antusias terhadap adanya program Padat Karya bahkan yang tidak termasuk ke dalam kriteria standar kebijakan dalam program ini juga ingin mengikuti. Tetapi dari pihak Kelurahan Dupak tidak mengizinkan apabila tidak termasuk ke dalam kriteria standar kebijakan terkait program ini. Hal ini menjadikan Kelurahan Dupak dapat dikatakan berhasil dalam mengimplementasikan program Padat Karya dalam konponen sasaran dan standar kebijakan.

4.1.2 Sumber Daya

4.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas secara tidak langsung akan dapat menghasilkan output yang baik yaitu berupa keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan karakter masyarakatnya. Secara luas, tidak hanya staff dan pegawai pemerintahan saja yang harus kompeten dalam suatu implementasi kebijakan tetapi keterlibatan dari masyarakat yang ada juga sangat penting. Karena, tanpa adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah suatu kebijakan tidak akan terealisasi dengan baik.

Dari hasil observasi, dan wawancara dengan Bapak Fitter Kusumaatmaja selaku staff Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Perekonomian Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa, sumber daya manusia yang terkait dengan masyarakat kategori miskin dan pra-miskin di Kelurahan Dupak memang bisa dikatakan perlu diberikan atau disalurkan implementasi dari suatu kebijakan program Padat Karya. Karena, didaerah tersebut masih dirasa minimnya pendidikan yang ditempuh yang membuat mereka sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

4.1.2.2 Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial juga dirasa penting selain dari faktor sumber daya manusia dalam mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang kompeten, namun tidak didukung dengan adanya sumber daya finansial yang

cukup maka dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan yang akan diterapkan.

Dari hasil observasi, dan wawancara dapat diketahui bahwa, sumber daya finansial yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan implementasi program Padat Karya ini mulai dari tahap survei sampai tahap penyaluran kepada masyarakat diperoleh dari pemerintah langsung, dan warga sama sekali tidak dipungut biaya.

4.1.2.3 Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu juga merupakan salah satu faktor dalam mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan. Hal ini bertujuan agar perintah dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Karena, apabila tidak adanya perencanaan waktu yang baik dapat menggagalkan terimplementasikannya suatu kebijakan. Hal ini membuktikan bahwa, sumber daya waktu cukup penting dalam pelaksanaan sebuah implementasi kebijakan publik.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis terkait dengan sumber daya waktu pelaksanaan program Padat Karya ini sebenarnya sudah direncanakan untuk jangka panjang kedepannya dengan tidak hanya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang melonjak tinggi akibat terjadinya pandemi virus Covid-19, tetapi juga dapat memberikan masa kerja kepada warga sampai batas usia maksimal yaitu 58 tahun.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian dapat diketahui bahwa, sumber daya yang termasuk sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu dalam menunjang keberhasilan implementasi program Padat Karya untuk mengurangi pengangguran di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya sudah cukup memadai, namun masih perlu ada beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki karena dianggap kurang menarik minat beberapa masyarakat akibat terdapat peraturan yang menyebutkan bahwa nantinya akan ditempatkan di seluruh wilayah Surabaya dan ini dirasa memberatkan bagi beberapa dari mereka yang termasuk ke dalam kategori miskin dan pra-miskin.

4.1.3 Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif apabila yang menjadi standar tujuan dari kebijakan publik tersebut dapat dipahami oleh para individu atau implementors yang bertanggung jawab langsung atas pencapaian dari standar dan tujuan kebijakan, karena standar dan tujuan dari suatu kebijakan memang harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Jika pelaksana dari suatu kebijakan dapat bersikap positif, maka implementasi dari suatu kebijakan juga akan berakhir positif. Akan tetapi, jika pelaksana kebijakan memiliki sikap negatif atau acuh tak acuh maka akan dapat menunda dan bahkan dapat menimbulkan hambatan-hambatan dari keterlaksanaan kebijakan. Pada penelitian ini yang termasuk ke dalam faktor pengukuran komunikasi antar badan pelaksana adalah terjadinya koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fitter Kusumaatmaja selaku staff Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Perekonomian dapat disimpulkan bahwa, pihak Kelurahan Dupak sudah berkoodinasi dengan Dinas Pendidikan terkait penyaluran warga yang berhak mendapatkan pekerjaan yang baik dengan tidak adanya kendala yang sampai tidak dapat menemukan solusi. Kekurangan dalam koordinasi komunikasi dengan warga hanyalah terkait dengan membujuk warga agar mau mengikuti program Padat Karya tersebut. Selain berkoodinasi dengan

Dinas Pendidikan, Kelurahan Dupak juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait dengan *update* data warga yang termasuk ke dalam kategori miskin dan pra-miskin.

4.1.4 Karakteristik Badan Pelaksana

4.1.4.1 Kompetensi dan Ukuran Staff Suatu Badan

Kompetensi dan ukuran staff suatu badan merupakan hal yang sangat penting dalam keberhasilan dari jalannya suatu kebijakan, karena suatu kebijakan pasti kuncinya ada pada staff suatu badan pemerintahan terlebih dahulu baru nantinya dilanjutkan oleh staff pemerintahan di bawahnya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fitter Kusumaatmaja selaku staff Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Perekonomian dapat disimpulkan bahwa, staff yang ditugaskan dalam pelaksanaan implementasi program Padat Karya ini sudah sesuai dengan arahan dan peraturan dari pemerintah terkait mengenai kriteria calon penerima program tersebut sedangkan untuk staff yang ditugaskan tidak ada aturan mengenai harus bagaimana.

4.1.4.2 Tingkat Pengawasan Hierarki Terhadap Keputusan Sub-Unit dan Proses dalam Badan Pelaksana

Tingkat pengawasan hierarki terhadap suatu keputusan sub-unit dan proses dalam badan pelaksana dirasa sama pentingnya, karena disinilah suatu proses implementasi dapat ditindaklanjuti kedepannya mau seperti apa dan bagaimana.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fitter Kusumaatmaja selaku staff Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Perekonomian dapat disimpulkan bahwa, keterlaksanaan program Padat Karya ini dijalankan dengan menerima arahan dan perintah dari atasan tanpa ikut andil dalam pengambilan proses dari suatu kebijakan tersebut.

4.1.4.3 Sumber Politik Suatu Organisasi (misalnya, dukungan diantara anggota legeslatif dan eksekutif)

Dukungan dari antar anggota legeslatif dan eksekutif sangatlah diperlukan dalam keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Karena, tanpa adanya dukungan suatu kebijakan kemungkinan terbesar kebijakan tersebut tidak akan dapat berjalan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fitter Kusumaatmaja selaku staff Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Perekonomian dapat disimpulkan bahwa, program Padat Karya ini sangat didukung oleh berbagai pihak yang terkait dengan dibuktikan dari Kelurahan Dupak dapat secara efektif mengatasi pengangguran yang ada di didaerahnya dan Kota Surabaya secara luasnya. Bahkan pemerintah secara luas ingin terus dapat mengembangkan keberlangsungan program Padat Karya ini agar lebih maksimal lagi.

4.1.4.4 Vitalitas Suatu Organisasi

4.1.4.5 Tingkat Komunikasi Terbuka (yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi)

Apabila suatu komunikasi dilakukan secara terbuka dapat menghilangkan persepsi negatif atau persepsi yang salah dari setiap individu dalam menjalankan suatu kebijakan. Dimana apabila terdapat

suatu masalah dalam pembuatan suatu kebijakan, maka dapat dibicarakan secara langsung dan terbuka akan ditemukan solusinya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fitter Kusumaatmaja selaku staff Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Perekonomian dapat disimpulkan bahwa, tingkat komunikasi antara Kelurahan Dupak dengan Dinas Pendidikan sangatlah baik. Kedua lembaga saling bekerjasama dalam membicarakan terkait kekurangan yang ada dalam menjalankan program Padat Karya ini. Selain itu, komunikasi dengan warga dari pihak Kelurahan Dupak juga sangat baik yang dibuktikan dari apabila ada warga yang tidak mampu membuat CV maka akan dibantu. Hal ini bisa dibilang Kelurahan Dupak membuat masyarakat yang ada dibawah naungannya merasa nyaman dan mau untuk berkomunikasi secara terbuka.

4.1.4.6 Kaitan Formal dan Informal Suatu Badan dengan Pembuat Keputusan atau Pelaksana Keputusan

Pembuat keputusan tidak kalah penting dalam tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan, karena apabila suatu kebijakan bermasalah maka harus segera ada solusi agar suatu kebijakan tersebut dapat segera terealisasi dengan baik.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Fitter Kusumaatmaja selaku staff Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Perekonomian dapat disimpulkan bahwa, program Padat Karya ini hanya diketahui oleh para petinggi atau atasan sedangkan pegawai yang dibawahnya hanya sebagai pelaksana perintah saja dari hasil suatu kebijakan.

4.1.5 Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan eksternal merupakan salah satu faktor dari turut terdorongnya keberhasilan dari suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif nantinya dapat menjadi suatu sebab atau biang keladi dari gagalnya suatu kinerja implementasi kebijakan yang terapkan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan dari suatu kondisi lingkungan eksternal. Van Metter dan Van Horn dalam sebuah penelitian juga mengajukan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa, "lingkungan ekonomi sosial, dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan pelaksana, kecenderungan para pelaksana, dan pencapaian itu sendiri".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fitter Kusumaatmaja selaku Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Perekonomian dapat disimpulkan bahwa, lingkungan sosial dari warga sendiri memang kurang baik atau sehat tetapi ada juga yang biasa saja. Adapun terkait dengan faktor politiknya dirasa tidak ada campur tangan, jadi harus real benar-benar dilakukan survei terkait penerima dan bagi warga yang benar-benar seharusnya menerima. Kalau faktor ekonomi dirasa sudah jelas ada yang dirasa termasuk warga masyarakat kekurangan, karena warga sampai ada yang minta-minta hanya untuk sekedar makan tapi juga ada warga yang termasuk ke dalam keluarga sederhana.

4.1.6 Sikap Pelaksana

Sikap atau kecenderungan para pelaksana yang dimaksud adalah terkait dengan penolakan atau penerimaan terhadap suatu kebijakan kedepannya akan dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Hal tersebut memungkinkan untuk terjadi yang disebabkan dari kebijakan yang dijalankan bukanlah merupakan hasil dari suatu musyawarah atau formulasi warga yang akan terimplementasi kebijakan tersebut. Karena, secara tidak

langsung warga lah yang benar-benar mengetahui terhadap permasalahan yang terjadi dan dirasakan didaerahnya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fitter Kusumaatmaja selaku Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Perekonomian dapat disimpulkan bahwa, sikap seluruh karyawan pegawai Kelurahan Dupak tulus dan memahami sebagai tuntutan mereka dalam pekerjaan untuk senantiasa terus melayani masyarakat di Kelurahan Dupak. Terlebih lagi ini terkait langsung dengan warga mereka yang termasuk dalam kategori miskin dan pra-miskin yang menyebabkan pihak Kelurahan ingin ikut dalam mengusahakan yang terbaik. Lebih dari pada itu, Bapak Lurah Kelurahan Dupak sendiri sangat antusias dengan adanya kerjasama program ini dan diharapkan kerjasama ini dapat membuahkan hasil yang baik bagi warga, sehingga warga yang terdampak program dapat merasa terbantu.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis terkait implementasi pelaksanaan Program Padat Karya untuk upaya mengatasi pengangguran di Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Padat Karya yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya terbukti efektif dapat mengurangi pengangguran di wilayah Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan 14 warga Kelurahan Dupak Kecamatan Krembangan yang sudah dipekerjakan dan disalurkan menyeluruh ke sekolah yang ada di wilayah Kota Surabaya. Warga yang sudah mendapatkan pekerjaan dari program ini merasa bersyukur sudah dibantu mengatasi permasalahan ekonomi mereka, sekarang untuk sekedar makan mereka tidak lagi meminta-minta. Walaupun belum ada solusi atau tindak lanjut mengenai warga yang terpilih mengikuti Program Padat Karya tetapi memilih untuk mengundurkan diri karena alasan pribadi.

Daftar Referensi

- Alwi, Z. (2022). *Analisis Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Upaya Mengurangi Masalah Penangguran Terdidik di Wilayah Kota Pekanbaru* [Thesis]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Aqila, C., Ismail, H., & Wahyudi, E. (2022). Efektivitas Kinerja Pelayanan Kelurahan Wonokusumo Terhadap Program Padat Karya Dispendukcapil Surabaya. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(04), 48–59.
- Budiasa, A. G. R., Raka, A. A. G., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) Pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 71–82. <https://doi.org/CC-BY-SA4.0License>
- Fajriatin, A. (2022). Rencana Strategis Tahun 2021-2026. In A. Fajriatin (Ed.), *Dinas Sosial Kota Surabaya* (pp. 1–97). Dinas Sosial Kota Surabaya.
- Herdiyana, D. (2019). Implementasi Padat Karya Tunai dalam Menurunkan Penduduk Miskin di Pedesaan Provinsi Lampung dan Riau. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 16(2), 176–188. <https://doi.org/10.25134/equi.v16i02>
- Julihandono, C. S. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Belanja Prioritas Program Padat Karya Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran di Masa Pandemi. *Indonesian Treasure Review*, 8(1), 51–62.

- Kasmad, R. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (R. Kasmad, Ed.; 1st ed.). Universitas Terbuka.
- Kurnia, U. E., & Widhiasthini, N. W. (2021). Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 5(1), 148–161. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Lafina, A. R., Sholichah, N., Wardhono, H., & Widyawati. (2023). Implementasi Program Padat Karya dalam Perspektif Collaborative Governance di Kelurahan Manyar Sabrangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7(2), 158–172. <https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/1502069923>
- Maulina, F. (2023). *Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai Desa (PDKT) dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Siswo Bangun Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam* [Thesis]. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Midayanti, N. (2023, June). Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. *Badan Pusat Statistik*, 1–14. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Naufal, M. K. R. (2021). Efektivitas Program Padat Karya Tunai dalam Mengatasi Masalah Pengangguran Pada Era Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura. *Institut Pemerintah Dalam Negeri*, 1–10. <https://jubi.co.id/papua-12-500-pengangguran-di-Kota-jayapura-pada2020/>
- Novanto, H. E., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Program Padat Karya Tunai Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 179–188. <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013, Pub. L. No. 33, Presiden Republik Indonesia (2013).
- Permani, G. A. (2019). *Analisis Hubungan Program Padat Karya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Magelang Tahun 2013-2017* [Thesis]. Universitas Tidar.
- Rumbia, N., Kemal, M. T., Wagola, E. S., Rasyid, M., & Aris, A. S. (2022). Pengaruh Penerapan Program Padat Karya Terhadap Mutu Pekerjaan Infrastruktur Desa. *Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 5(2), 497–508. <https://doi.org/10.31602/jk.v5i2.9421>
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (H. Upu, Ed.; 1st ed.). Pustaka Ramadhan.
- Setiawan, A. C. (2023, October). Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Kota Surabaya Maret 2023. *Badan Pusat Statistik Kota Surabaya*, 1–8. <http://surabayakota.bps.go.id>
- Sofi, I. (2020). Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Matra Pembaruan*, 4(1), 25–35. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.25-35>

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sugiyono, Ed.; 10th ed.). ALFABETA.

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskirana, Eds.; 1st ed.). AIPI.

Wandan Sari, Y., & Merinawati. (2024). Strategi Program Padat Karya Oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Warga Kota Surabaya (Studi Proyek Padat Karya Paving Tambaksari Surabaya). *Jurnal Publika*, 12(3), 292–307.

Yuliana. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Padat Karya pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 100–111. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3580>